

## Peningkatan Kompetensi Masyarakat dalam Mengelola *Website* Desa Melalui Pendampingan Intensif

M. Iqbal Parabi<sup>1</sup>, Agung Putra Wijaya<sup>2\*</sup>, Dwi Tirta Kencana<sup>3</sup>, Priyambodo<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung

<sup>2</sup>Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung

<sup>3</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teknokrat Indonesia

<sup>4</sup>Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung

\*Email: [agung.wijaya@fkip.unila.ac.id](mailto:agung.wijaya@fkip.unila.ac.id)

Received: 13 Juni 2026

Revison: 22 Juni 2026

Accepted: 26 Juni 2026

Published: 28 Juni 2026

### Abstrak

Penerapan e-government di wilayah rural sering kali menghadapi kendala berupa fenomena website desa yang “mati suri” akibat rendahnya kompetensi sumber daya manusia yang mengelolanya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat Desa Budi Lestari, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan dalam mengelola website resmi desa sebagai media transparansi dan pelayanan publik. Pendekatan yang digunakan adalah Participatory Action Research melalui tahapan Plan, Do, dan See, dengan melibatkan 30 peserta aktif. Intervensi dilakukan melalui bimbingan teknis dan pendampingan intensif berbasis praktik langsung (hands-on) dan one-on-one mentoring. Peningkatan kompetensi diukur menggunakan instrumen kuesioner pre-test dan post-test yang mencakup tiga domain utama, yakni teknis CMS, jurnalistik konten, dan keamanan data. Hasil analisis data menunjukkan adanya lonjakan rata-rata skor kompetensi peserta yang sangat signifikan sebesar 141,1%, dari rata-rata nilai awal (pre-test) 35,27 menjadi 85,03 pada nilai akhir (post-test). Peningkatan tertinggi terjadi pada domain kompetensi keamanan dan akuntabilitas digital yang mencapai 189,7%. Pasca-pendampingan, masyarakat telah mandiri dalam mempublikasikan infografis APBDes dan rilis berita kegiatan, serta telah cakap mengelola etalase digital branding produk lokal. Formula pengintegrasian infrastruktur teknologi yang berjalan paralel dengan pendampingan intensif ini terbukti efektif mengurai risiko ketidakberlanjutan sistem dan berhasil menumbuhkan rasa kepemilikan mitra menuju tata kelola smart village yang mandiri.

**Kata Kunci:** literasi digital; pendampingan intensif; peningkatan kompetensi; smart village; website desa

### Abstract

The implementation of e-government in rural areas often faces obstacles in the form of “dormant” websites due to the low competence of the human resources managing them. This activity aimed to improve the competence of the community in Budi Lestari Village, Tanjung Bintang, South Lampung in managing the official village website as a medium for transparency and public services. The approach used was Participatory Action Research through the stages of Plan, Do, and See, involving 30 active participants. The intervention was carried out through technical workshops and intensive hands-on mentoring along with one-on-one mentoring. Competence improvement was measured using pre-test and post-test questionnaire instruments covering three main domains, namely CMS technical skills, content journalism, and data security. The results of data analysis showed a highly significant surge in the participants' average competence score by 141.1%, from an initial pre-test average of 35.27 to 85.03 in the final post-test. The highest increase occurred in the domain of digital security and accountability competence, reaching 189.7%. Post-mentoring, the community has become independent in publishing APBDes infographics and activity news releases, as well as proficient in managing the digital branding showcase of local products. The formula of integrating technological infrastructure running parallel with intensive mentoring has proven effective in mitigating the risk of system discontinuity and successfully fostering a sense of ownership among partners toward independent smart village governance.

**Keywords:** competence improvement; digital literacy; intensive mentoring; smart village; village website

## PENDAHULUAN

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di tingkat pemerintahan terkecil, yaitu desa, saat ini bukan lagi sekadar pilihan melainkan sebuah tuntutan struktural seiring dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Regulasi ini menjadi tonggak baru bagi otonomi desa, di mana setiap desa diwajibkan untuk menyelenggarakan sistem informasi desa yang terintegrasi secara baik. Secara teoretis, implementasi *electronic government (e-government)* melalui pengembangan website desa merupakan bagian integral dari strategi modernisasi birokrasi yang bertujuan untuk menciptakan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik (Kennedy dkk., 2024).

Pemanfaatan *platform* digital di tingkat lokal memungkinkan pemerintah desa untuk melampaui hambatan geografis dan administratif yang selama ini menjadi kendala dalam pelayanan masyarakat. *Website* desa tidak hanya berfungsi sebagai media publikasi statis, melainkan sebagai instrumen dinamis untuk mendiseminasikan rencana pembangunan, realisasi penggunaan dana desa, hingga kebijakan strategis lainnya secara waktu nyata (*real-time*). Keterbukaan data yang dapat diakses oleh publik secara digital ini menjadi krusial karena transparansi informasi adalah fondasi utama dalam membangun kembali kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan di tingkat akar rumput (Rahma dkk., 2025).

Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi di daerah rural masih menghadapi tantangan dan hambatan yang signifikan. Kesenjangan digital (*digital divide*) yang terjadi di wilayah pedesaan sering kali disalahartikan hanya sebagai masalah ketersediaan infrastruktur fisik semata. Kajian men-

dalam menunjukkan bahwa hambatan utama yang lebih fundamental adalah rendahnya literasi digital dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang mengelola teknologi tersebut (Indrajit, 2022). Keberhasilan sebuah sistem informasi publik sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur lunak, yakni kompetensi para perangkat desa dalam mengelola, memverifikasi, dan menyajikan data secara informatif kepada warga (Pitrianti dkk., 2023). Tanpa adanya keterampilan manajerial dan teknis yang mumpuni, *platform* digital atau website desa yang sudah dibangun sering kali berakhir menjadi situs yang tidak aktif, terbengkalai, atau “mati suri” setelah tahap serah terima dilakukan (Jamiah dkk., 2024). Oleh karena itu, kegiatan penguatan kompetensi melalui pendampingan yang intensif dan berkelanjutan menjadi prasyarat mutlak agar transformasi digital di tingkat desa tidak hanya bersifat seremonial, tetapi mampu memberikan dampak jangka panjang terhadap modernisasi pelayanan publik (Amane dkk., 2025).

Kondisi objektif ini terefleksi secara jelas di Desa Budi Lestari, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan. Sebagai desa yang memiliki potensi geografis besar, Budi Lestari sebenarnya berpeluang akseleratif untuk berkembang melalui optimalisasi layanan publik berbasis digital. Namun, secara spasial, desa ini terletak cukup terpencil dengan jarak sekitar 14 kilometer dari pusat administrasi kecamatan, yang berimplikasi pada lambatnya penetrasi pembaruan informasi birokrasi fisik. Selain itu, data statistik sekunder menunjukkan kontradiksi siber; meskipun penetrasi kepemilikan gawai (*smartphone*) di kalangan warga usia produktif telah mencapai angka 76%, pemanfaatannya masih terbatas untuk kebutuhan hiburan (*entertainment*) dan komunikasi personal. Sebalik-

nya, lebih dari 60% aparatur desa senior di lingkungan pemerintahan desa belum menguasai operasional komputer dasar. Kombinasi data spasial dan keterbatasan kecakapan teknis inilah yang mempertegas mengapa isu *digital divide* dan *technophobia* terjadi secara masif di sana. Akibatnya, pola komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat setempat masih didominasi oleh metode konvensional, di mana penyampaian informasi mengenai profil desa, rencana pembangunan (APBDes), pengumuman kegiatan, dan potensi wilayah hanya dilakukan melalui media lisan atau alat peraga fisik di kantor desa.

Pola lama ini menyebabkan informasi sering kali tidak tersampaikan secara aktual dan menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi warga yang bekerja di luar wilayah desa atau memiliki keterbatasan waktu. Ketidakhadiran media informasi digital resmi yang terintegrasi memicu ketertutupan informasi dan menyulitkan pihak luar maupun calon investor untuk melihat prospek pengembangan ekonomi di desa tersebut. Fenomena ini sejalan dengan pandangan bahwa desa tanpa kehadiran citra digital (*digital branding*) yang kuat akan mengalami kesulitan dalam melakukan akselerasi pembangunan karena terbatasnya jejaring informasi (Mayyora dkk., 2025).

Selain menghambat aspek pelayanan dan publikasi potensi desa, ketiadaan kanal informasi resmi berbasis siber meningkatkan risiko kerentanan masyarakat pedesaan terhadap paparan misinformasi atau berita bohong siber yang beredar luas di media sosial. Di era keterbukaan informasi, isu-isu sensitif seperti penyaluran bantuan sosial (bansos) atau alokasi dana desa rentan memicu salah paham dan konflik horizontal apabila tidak diklarifikasi melalui sumber data yang valid. Dalam perspektif komunikasi pembangunan, ke-

hadiran portal resmi desa berfungsi vital sebagai *single source of truth* (sumber rujukan utama) yang menyediakan validasi data bagi masyarakat (Wahyiah, 2025). Literasi digital masyarakat desa secara perlahan akan terbentuk apabila pemerintah menyediakan kanal informasi yang kredibel, mudah diakses, dan responsif (Simamora dkk., 2025). Sinergi antara penyediaan layanan administrasi kependudukan yang praktis di dalam website serta penguatan kompetensi digital aparatur desa akan memotong birokrasi yang berbelit-belit, sehingga mewujudkan ekosistem tata kelola pemerintahan desa yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi (Alyaning dkk., 2026).

Guna menyelesaikan permasalahan tersebut, tim pengabdian kepada masyarakat melaksanakan program pengembangan dan pendampingan pengelolaan *website* desa di Desa Budi Lestari. Urgensi utama dari pengabdian ini bertumpu pada penerapan metode pendampingan intensif berbasis *Participatory Action Research* (PAR) (Mubassir dkk., 2025). Melalui pendekatan ini, perangkat desa tidak diposisikan sebagai objek pasif penerima teknologi, melainkan dilibatkan secara aktif sebagai mitra utama dari bawah (*bottom-up*) mulai dari tahapan perencanaan arsitektur web (*Plan*), bimbingan teknis praktik langsung (*Do*), hingga evaluasi umpan balik serta refleksi bersama (*See*). Penekanan pada aspek pendampingan intensif ini dirancang untuk menumbuhkan rasa kepemilikan (*sense of ownership*) mitra terhadap aset digital secara mandiri. Secara spesifik, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mentransformasi kapasitas aparatur desa dan penggerak ekonomi lokal melalui peningkatan kompetensi literasi digital yang terukur pada domain teknis CMS, jurnalistik konten, serta keamanan data publik. Melalui pencapaian tujuan

tersebut, integrasi antara pembangunan infrastruktur teknologi informasi berupa website desa dan peningkatan kompetensi literasi digital aparatur desa ini diharapkan dapat menjadi model implementasi desa cerdas (*smart village*) yang berkelanjutan, mandiri, dan berdaya saing di Kabupaten Lampung Selatan.

## **METODE**

### **Desain dan Subjek Kegiatan**

Kegiatan ini dirancang menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) (Mubassir dkk., 2025). Pendekatan ini dipilih karena mengutamakan partisipasi aktif, kolaborasi, dan aksi nyata dari mitra sasaran untuk memecahkan masalah kesenjangan digital secara mandiri. Subjek kegiatan ini berjumlah 30 orang yang terdiri dari Kepala Desa, aparatur Desa Budi Lestari, dan perwakilan pelaku UMKM lokal di Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan. Pelaksanaan program dilakukan secara intensif selama tiga bulan.

### **Tahapan Pelaksanaan (Siklus PAR)**

Implementasi metode PAR di lapangan dibagi ke dalam tiga tahapan yang sistematis, yaitu *Plan* (Perencanaan), *Do* (Pelaksanaan/Aksi), dan *See* (Refleksi/Evaluasi):

#### **Tahap Perencanaan (Plan)**

Aktivitas yang dilakukan pada tahap ini, meliputi (1) Analisis Situasi *Baseline*: Melakukan observasi awal untuk memetakan kendala komunikasi konvensional dan mengukur kecemasan teknologi (*technophobia*) mitra; (2) *Focus Group Discussion (FGD)*: Menyelenggarakan FGD kolaboratif bersama Kepala Desa dan perangkatnya untuk memetakan kebutuhan data pelayanan publik, transparansi anggaran, serta modul promosi UMKM; dan (3) Penyusunan *Blueprint*: Merancang arsi-

tektur informasi website desa berdasarkan hasil FGD yang meliputi menu profil, transparansi APBDes, panduan layanan publik, dan etalase digital UMKM sebagai media praktik peningkatan kompetensi.

#### **Tahap Pelaksanaan (Do)**

Aktivitas yang dilakukan pada tahap ini, meliputi (1) *Workshop* Literasi Digital: Memberikan pembekalan teoretis mengenai pentingnya keterbukaan informasi publik dan *digital branding* pedesaan; (2) Bimbingan Teknis (Bimtek) *Hands-On*: Menyelenggarakan pelatihan praktik langsung di depan komputer menggunakan dasbor *Content Management System (CMS) website* (Khomsah dkk., 2023). Materi bimtek difokuskan pada tiga pilar kompetensi, yakni (a) Kompetensi Teknis CMS: Praktik mengelola dasbor, tata letak menu, dan pemutakhiran data, (b) Kompetensi Jurnalistik Konten: Praktik menyusun narasi berita berbasis 5W+1H (Subagja & Raturahmi, 2025) dan mengelola foto produk UMKM, dan (c) Kompetensi Keamanan & Akuntabilitas: Pelatihan manajemen kata sandi yang kuat, pencadangan data, serta pembuatan infografis keuangan; (c) Pendampingan Intensif *One-on-One Mentoring* (Yulisasih dkk., 2025): Menempatkan mahasiswa sebagai asisten teknis personal bagi setiap peserta untuk mempermudah transfer pengetahuan dan mempercepat adaptasi gawai secara repetitif selama tiga bulan.

#### **Tahap Refleksi dan Evaluasi (See)**

Aktivitas yang dilakukan pada tahap ini, meliputi (1) Evaluasi Formatif & Sumatif: Melakukan penilaian terhadap kemandirian praktis mitra dalam memperbarui konten secara berkala tanpa intervensi tim pengabdian dan (2) Penyusunan Solusi Keberlanjutan: Mengonfigurasi aspek teknis CMS agar

ringan saat diakses pada jaringan internet rural, serta menyusun dan menyerahkan modul panduan operasional tertulis sebagai rujukan mandiri jangka panjang.

### **Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kompetensi**

Untuk mengukur efektivitas pendampingan intensif secara empiris, digunakan instrumen kuesioner terstruktur yang disebarakan kepada peserta dalam dua fase pengumpulan data, yakni (1) *Pre-Test* yang disebarakan pada awal tahap *plan* untuk mengukur kemampuan awal kompetensi masyarakat sebelum diberikan intervensi dan (2) *Post-Test* yang disebarakan pada akhir tahap *see* untuk mengukur capaian akhir kompetensi masyarakat setelah menerima pendampingan intensif (Wardani dkk., 2024).

Instrumen *pre-test* dan *post-test* yang digunakan dalam pengabdian ini mengombinasikan dua bentuk penilaian, yaitu tes objektif pilihan ganda untuk mengukur aspek pengetahuan kognitif teoretis (*knowledge*) dan rubrik penilaian performa uji kinerja nyata (*performance-based assessment*) untuk mengukur kecakapan praktis (*skill*) dalam mengoperasikan sistem siber desa.

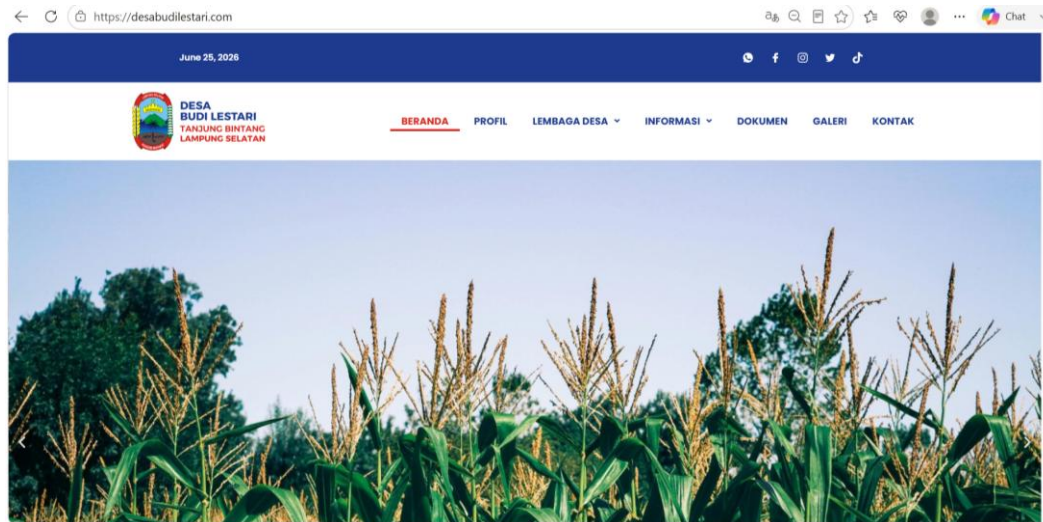
Aspek kognitif diukur melalui 15 butir soal pilihan ganda yang mencakup regulasi keterbukaan informasi, etika komunikasi digital siber, prinsip dasar jurnalistik 5W+1H, dan konsep dasar keamanan data publik. Sementara itu, aspek performa praktis diukur menggunakan lembar observasi berwujud rubrik penilaian kinerja dengan

skala Likert 1–4, di mana tim penguji menilai kelancaran dan ketepatan peserta secara langsung saat melakukan simulasi tugas operasional (*hands-on*). Tugas operasional tersebut meliputi: (1) proses masuk log (*login*) dan mengubah tata letak menu dasbor CMS, (2) menyusun draf berita sekaligus mengunggah foto etalase UMKM yang proporsional, serta (3) mengonfigurasi kata sandi berlapis dan mempublikasikan diagram infografis APBDes.

Skor mentah dari gabungan kedua instrumen tersebut kemudian dikonversi secara matematis ke dalam skala nilai standar 0–100 untuk menjamin validitas interpretasi data. Skor tersebut dikelompokkan ke dalam kategori tingkat capaian, yaitu Tidak Kompeten (0–55), Cukup Kompeten (56–70), Kompeten (71–85), dan Sangat Kompeten (86–100). Persentase peningkatan kompetensi dihitung menggunakan rumus perubahan relatif guna menunjukkan signifikansi dampak dari pendampingan intensif yang telah dilaksanakan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan ini telah diselenggarakan secara penuh selama tiga bulan. Menggunakan pendekatan PAR, kegiatan ini berfokus pada peningkatan kompetensi masyarakat dengan melibatkan 30 peserta aktif yang terdiri atas kepala desa, aparatur desa, dan perwakilan penggerak UMKM lokal.



**Gambar 1.** Halaman Utama Website Desa Budi Lestari

Rangkaian aktivitas pendampingan intensif ini berjalan lancar dengan tingkat ketercapaian target aktivitas sebesar 100%. Berdasarkan tiga tahapan utama dalam siklus PAR (*Plan, Do, See*), proses dan hasil konkret peningkatan kompetensi masyarakat dijabarkan sebagai berikut:

#### **Tahap Perencanaan (*Plan*): Pemetaan *Baseline* Kompetensi dan Kebutuhan**

Tahap awal diwujudkan melalui diskusi kelompok terfokus FGD kolaboratif bersama Kepala Desa dan aparat desa untuk mengidentifikasi hambatan literasi digital serta memetakan data pelayanan publik yang mendesak untuk didigitalisasi. Berdasarkan hasil pemetaan, disusun dokumen *blueprint* arsitektur informasi *website* desa sebagai media praktik penumbuhan kompetensi masyarakat. Struktur media praktik ini dirancang mencakup empat komponen utama, yaitu: (1) Menu Profil Desa: Memuat visualisasi sejarah, visi-misi, struktur organisasi pemerintahan, dan peta geografis wilayah; (2) Menu Transparansi Anggaran: Wadah khusus untuk melatih kompetensi akuntabilitas dalam mempublikasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara terbuka; (3) Menu Layanan

Publik: Kanal informasi yang memuat infografis persyaratan administratif kependudukan guna memotong birokrasi konvensional; dan (4) Modul Potensi dan UMKM: Etalase digital interaktif yang dirancang khusus untuk melatih kompetensi *digital branding* produk unggulan lokal hasil kreativitas warga desa.

#### **Tahap Pelaksanaan (*Do*): Peningkatan Kompetensi Melalui Pendampingan Intensif**

Setelah infrastruktur portal *website* selesai dikembangkan, tim melaksanakan *Workshop* Literasi Digital dan Bimtek secara intensif. Pendampingan ini menerapkan metode *hands-on*, di mana setiap pengelola dibekali akun administrator untuk mengoperasikan dashboard CMS *website*. Selama proses ini, mahasiswa pendamping berperan aktif sebagai asisten pendamping teknis *one-on-one mentoring* untuk mempercepat proses transfer pengetahuan dan mengatasi hambatan adaptasi teknologi bagi perangkat desa.

### **Tahap Refleksi dan Evaluasi (See): Analisis Data Peningkatan Kompetensi Masyarakat**

Tahap akhir difokuskan pada evaluasi formatif dan sumatif menggunakan instrumen kuesioner *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur efektivitas pendampingan intensif terhadap tingkat peningkatan kompetensi literasi digital peserta. Parameter penilaian dibagi menjadi tiga domain utama kompetensi, yakni Kompetensi Teknis CMS, Kompetensi Jurnalistik & Manajemen Konten, serta Kompetensi Keamanan Data & Akuntabilitas Digital.

Berdasarkan hasil olah data statistik deskriptif terhadap skor *pre-test* dan *post-test*, terjadi lonjakan kompetensi masyarakat sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

### **Analisis Distribusi Data Perubahan Performa Peserta**

Data *pre-test* menunjukkan bahwa 83,3% peserta berada dalam kategori “Tidak Kompeten” dengan rata-rata skor total hanya 35,27. Sebagian besar perangkat desa senior mengalami kecemasan teknologi (*technophobia*) dan belum pernah mengoperasikan sistem manajemen web, sedangkan pelaku UMKM lokal hanya memanfaatkan gawai untuk komunikasi pribadi tanpa

memahami esensi *digital branding* siber. Setelah dilakukan *one-on-one mentoring* secara berkala selama tiga bulan, data *post-test* merekam lompatan rata-rata skor menjadi 85,03 (meningkat sebesar 141,1%). Distribusi nilai akhir menunjukkan bahwa 90% peserta kini berada pada kategori “Kompeten” hingga “Sangat Kompeten”, sedangkan 10% sisanya berada pada kategori “Cukup Kompeten” namun tetap mampu menjalankan fungsi operasional dasar situs dengan bantuan modul cetak.

### **Indikator Kemandirian Praktis**

Peningkatan kompetensi berbasis data di atas tidak sekadar teoretis, melainkan terbukti dari kemandirian aktivitas mitra pasca-pelatihan, antara lain: (1) Kemandirian Admin Desa: Mampu mengunggah rilis berita kegiatan desa secara mandiri tanpa supervisi tim pengabdian; (2) Kemandirian Pengelola Anggaran: Sukses melakukan transformasi data laporan keuangan APBDes mentah menjadi infografis digital; dan (3) Kemandirian Pelaku UMKM: Perwakilan UMKM mitra telah terampil mengelola foto produk, menyusun deskripsi harga, serta menyematkan tautan kontak niaga ke dalam modul etalase digital secara interaktif.

**Tabel 1.** Data Akumulasi Skor Peningkatan Kompetensi Masyarakat

No	Domain Kompetensi	Rataan Skor <i>Pre-Test</i>	Rataan Skor <i>Post-Test</i>	Peningkatan (%)	Kategori Capaian
1	Kompetensi Teknis CMS	35,5	87,8	147,3	Sangat Kompeten
2	Kompetensi Jurnalistik & Konten	42,0	85,3	103,1	Kompeten
3	Kompetensi Keamanan & Akuntabilitas	28,3	82,0	189,7	Kompeten
<b>Rata-rata Keseluruhan</b>		<b>35,27</b>	<b>85,03</b>	<b>141,1%</b>	<b>Sangat Kompeten</b>

### **Pembahasan dan Analisis Dampak**

Keberhasilan peningkatan kompetensi digital aparatur desa dan pelaku UMKM di Desa Budi Lestari memberikan penegasan teoretis dan praktis bahwa akselerasi teknologi di wilayah rural wajib diintegrasikan secara paralel dengan penguatan kapasitas sumber daya manusianya. Data empiris menunjukkan lonjakan rata-rata skor kompetensi sebesar 141,1% (dari 35,27 menjadi 85,03), yang membuktikan bahwa hambatan literasi dapat diurai secara signifikan melalui intervensi pendampingan yang bersifat intensif dan aplikatif. Dampak serta implikasi dari peningkatan kompetensi masyarakat ini dianalisis secara mendalam melalui aspek-aspek berikut:

### **Efektivitas Pendampingan Intensif dalam Mengatasi Kesenjangan Digital**

Kesenjangan digital yang terjadi di wilayah pedesaan sering kali disalahartikan hanya sebagai masalah ketidaktersediaan infrastruktur fisik semata (*the first-level digital divide*). Namun, dalam lanskap masyarakat modern, hambatan utama yang lebih fundamental adalah rendahnya literasi digital dan kecakapan dalam memanfaatkan teknologi tersebut secara produktif (*the second-level digital divide*) (Indrajit, 2022). Fenomena ini terlihat jelas pada data awal, di mana 83,3% peserta masuk dalam kategori “Tidak Kompeten” karena mengalami kecemasan teknologi (*technophobia*) dan belum familier dengan manajemen situs *website*.

Penerapan metode pendampingan intensif berbasis praktik langsung (*hands-on*) dan asisten teknis *one-on-one mentoring* terbukti menjadi solusi strategis untuk meruntuhkan resistensi tersebut. Melalui intervensi ini, peningkatan tertinggi tercatat pada domain Kompetensi Keamanan & Akuntabilitas

Digital sebesar 189,7%. Peningkatan tajam ini membuktikan bahwa pendekatan personal dan repetitif mampu mengubah aparatur desa dari pengguna pasif menjadi pengelola siber yang cakap dan percaya diri. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pengembangan kapasitas nasional yang menyatakan bahwa penguatan *brainware* (kesiapan manusia) merupakan penentu utama keberlanjutan sebuah ekosistem digital (Amane dkk., 2025). Tanpa adanya transfer pengetahuan (*knowledge transfer*) yang intensif, infrastruktur teknologi informasi di pedesaan cenderung berakhir menjadi aset yang tidak aktif atau “mati suri” setelah program pembangunan selesai (Jamiah dkk., 2024).

### **Transformasi Birokrasi dan Optimalisasi Keterampilan Layanan Publik**

Sebelum pelaksanaan program, keterbatasan kompetensi digital aparatur menyebabkan pola komunikasi birokrasi di Desa Budi Lestari masih bersifat konvensional (mengandalkan papan pengumuman fisik dan penyampaian lisan). Pola lama ini menciptakan kesenjangan informasi, khususnya bagi warga desa yang bekerja di luar daerah atau memiliki keterbatasan waktu untuk mengunjungi balai desa pada jam kerja kantor.

Melalui lompatan Kompetensi Teknis CMS sebesar 147,3% (dari rata-rata skor 35,5 menjadi 87,8), perangkat desa kini memiliki kapasitas penuh untuk mentransformasikan model pelayanan publik menjadi berbasis elektronik (*e-government*). Kemandirian admin dalam mengunggah rilis berita, memperbarui data kependudukan, dan menyusun infografis persyaratan administratif secara mandiri dalam waktu singkat telah memotong alur birokrasi yang berbelit-belit. Modernisasi tata kelola ini tidak hanya memangkas jarak geografis

antara pemerintah desa dan warga, tetapi juga menciptakan sistem pelayanan publik yang jauh lebih adaptif, efisien, dan inklusif (Alyaning dkk., 2026).

### **Penguasaan Kompetensi Informasi sebagai Instrumen Mitigasi Misinformasi**

Di era keterbukaan informasi, masyarakat pedesaan merupakan salah satu kelompok yang paling rentan terpapar misinformasi atau berita bohong di media sosial, terutama yang berkaitan dengan isu sensitif seperti validitas data penerima bantuan sosial (bansos) dan alokasi dana desa. Ketidakhadiran kanal digital resmi di masa lalu yang dikelola secara kompeten berpotensi memicu ketertutupan data yang berujung pada menurunnya kepercayaan publik (*public distrust*) terhadap aparat pemerintahan desa.

Peningkatan kompetensi aparaturnya dalam menyajikan data anggaran dan kebijakan desa secara transparan berfungsi sebagai penyedia *Single Source of Truth* (sumber rujukan utama yang tervalidasi) (Handayani dkk., 2022). Ketika seluruh struktur APBDes dipublikasikan secara infografis di ruang siber oleh pengelola yang kompeten, masyarakat mendapatkan ruang konfirmasi terbuka. Akuntabilitas digital ini secara efektif menekan potensi konflik horizontal, memitigasi penyebaran hoaks di tingkat akar rumput, dan membangun kembali kedekatan hubungan berbasis kepercayaan (*trust*) antara pemerintah desa dan warganya (Wahyiah, 2025; Rahma dkk., 2025).

### **Penguatan Kompetensi *Digital Branding* bagi Akselerasi Ekonomi Kreatif Rural**

Tantangan klasik yang dihadapi oleh para pelaku UMKM di Desa Budi Lestari adalah keterbatasan jangkauan

pasar akibat ketergantungan pada rantai distribusi konvensional yang pendek dan terbatas. Penguasaan keterampilan baru dalam mengelola modul etalase digital pada website desa (meningkat 103,1% pada domain jurnalistik dan konten) berhasil mengubah tantangan ini melalui mekanisme *digital branding* (Apriani & Wahdiniawati, 2024).

Aparatur dan perwakilan UMKM kini mampu melakukan kurasi produk lokal, menyusun deskripsi harga yang informatif, serta menyematkan tautan kontak niaga secara interaktif ke ruang siber. Kapasitas promosi digital yang mandiri ini memperluas akses pasar hingga ke luar daerah bahkan berpotensi menarik minat calon investor luar untuk melihat prospek ekonomi desa (Mayyora dkk., 2025). Pendekatan inovatif ini sangat selaras dengan peta jalan pengembangan *smart village*, di mana teknologi informasi dioptimalkan secara produktif oleh masyarakat yang telah berdaya untuk mendongkrak taraf hidup dan kemandirian ekonomi rural (Gaol dkk., 2026).

### **Analisis Kendala Pendampingan dan Solusi Mitigasi Keberlanjutan**

Meskipun hasil data kuesioner menunjukkan peningkatan performa yang sangat memuaskan, tim mencatat adanya beberapa kendala lapangan yang bersifat dinamis. Kendala tersebut meliputi fluktuasi stabilitas jaringan internet di area rural serta variasi kecepatan adaptasi teknologi pada beberapa perangkat desa senior yang membutuhkan waktu pengulangan (*retraining*) lebih lama.

Sebagai langkah mitigasi strategis agar kompetensi yang telah terbentuk tidak menurun dan *website* desa terhindar dari risiko tidak aktif pasca-serah terima, diterapkan dua solusi operasional, yakni: (1) Optimalisasi Teknis Situs: *Website* desa dikonfigurasi meng-

gunakan arsitektur transfer data yang ringan (*lightweight data transfer*). Hal ini memastikan situs tetap responsif dan mudah dioperasikan oleh admin lokal meskipun menggunakan jaringan internet berkecepatan rendah (Kusuma & Risal, 2020); (2) Penyediaan Modul Panduan Praktis: Tim pengabdian menyusun dan menyerahkan buku panduan teknis operasional tertulis yang sangat aplikatif. Modul ini berfungsi sebagai rujukan mandiri jangka panjang bagi admin desa untuk menjaga stabilitas kompetensi serta menumbuhkan rasa kepemilikan (*sense of ownership*) mitra terhadap aset digital yang telah dibangun bersama (Jamiah dkk., 2024); dan (3) Medorong pemerintah Desa Budi Lestari untuk menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa terkait penunjukan resmi Tim Pengelola/Admin Website Desa. Aspek legalitas birokrasi lokal ini akan menjamin keberlanjutan tata kelola *smart village* secara permanen.

#### SIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan dan pembahasan, metode pendampingan intensif berbasis *Participatory Action Research* (PAR) terbukti sangat efektif dalam mendongkrak kapasitas digital masyarakat siber rural. Peningkatan kompetensi ini ditunjukkan oleh data konkret evaluasi yang merekam lonjakan rata-rata skor literasi digital peserta sebesar 141,1% (dari rata-rata *pre-test* sebesar 35,27 naik drastis menjadi 85,03 pada *post-test*). Peningkatan performa tertinggi dicapai pada domain Kompetensi Keamanan & Akuntabilitas Digital sebesar 189,7%, disusul oleh Kompetensi Teknis CMS sebesar 147,3%, dan Kompetensi Jurnalistik & Konten sebesar 103,1%. Keberhasilan penguatan kapasitas *brainware* ini memberikan dampak transformatif yang nyata di lapangan, di antaranya: (1) Kemandirian Aparatur Desa:

Terwujudnya kemandirian penuh aparaturnya dalam mengoperasikan dasbor website, memperbarui data pelayanan publik, serta mempublikasikan transparansi anggaran APBDes secara interaktif guna memotong jalur birokrasi konvensional, (2) Mitigasi Informasi Resmi: Terbentuknya kanal informasi terpercaya (*Single Source of Truth*) (Irvan dkk., 2023) di tingkat desa yang efektif memitigasi risiko penyebaran hoaks dan misinformasi siber di tengah masyarakat pedesaan, dan (3) Kemandirian Pelaku UMKM: Meningkatnya keterampilan para pelaku UMKM lokal dalam melakukan *digital branding* produk unggulan melalui pengelolaan modul etalase digital portal desa guna memperluas jangkauan pasar ekonomi rural. Pengintegrasian infrastruktur teknologi yang berjalan paralel dengan pendampingan intensif terbukti menjadi formula strategis dalam mengurai risiko *website* “mati suri”, sekaligus menumbuhkan rasa kepemilikan (*sense of ownership*) yang kuat bagi mitra demi menjamin keberlanjutan tata kelola *smart village* (Kampi dkk., 2025) secara mandiri dan berkesinambungan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alyaning, L., Budiati, A., & Prafitri, N. (2026). Inovasi Pelayanan Publik pada Program Website Sobat Disdukcapil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang. *Kajian Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi*, 3(1), 71-85, <https://doi.org/10.62383/kajian.v3i1.839>
- Amane, A. P. O., Lestari, A., Badruddin, S., Hardianti, Barsei, A. N., Mukrimah, Surjanto, Waliah, S., Winarti, N., Heriyanto, Putri, N. A. D., Malawat, S. H., Haliq, A., Lempao, N. M., Subiyakto, R.,

- Samin, R., Sholeh, C., Kusumawardhani, D., & Syamsuadi, A. (2025). *Inovasi dan Kebijakan Publik di Era Digital*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Apriani, A. & Wahdiniawati, S. A. (2024). Branding Produk UMKM Desa Cogreg Melalui Aplikasi Pemasaran Digital. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Penelitian Terapan*, 2(3), 94-101. <https://doi.org/10.38035/jpmpt.v2i3.594>
- Gaol, I, D, L., Bisri, M. H., Gamaputra, G., & Rahmat, D. (2026). Optimalisasi Smart Village Melalui Pelayanan Publik Digital Berbasis SDGs di Desa Mojorejo. *Jurnal Edukasi Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 240-251. <https://10.36636/eduabdimas.v5i2.9475>
- Handayani, S., Hanila, S., Prawitasari, A., Fitriano, Y., & Wulandari, W. (2022). Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Melalui Pelatihan Website, Menuju Desa Digital Desa Air Dingin. *Jurnal Dehasen Mengabdi*, 1(2), 179–182. <https://doi.org/10.37676/jdm.v1i2.3330>
- Indrajit, R. E. (2022). *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi.
- Irvan, M., Azhary, R. I., Destarini, D. D., & Zulkarnaen, I. (2023). Penguatan Tata Kelola Desa Digital Melalui Sosialisasi Desa.Id bagi Perangkat Desa Kubangdeleg. *Jurnal Pintar Abdimas*, 3(2), 111-122. <https://doi.org/10.33603/jpas.v3i2.11127>
- Jamiah, R., Yuliasari, A., & Syahid, A. (2024). Pendampingan Pengelolaan Website Desa Sebagai Bentuk Komunikasi Publik Pemerintah Desa. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Royal*, 7(2), 211-217. <https://doi.org/10.33330/jurdimas.v7i2.2901>
- Kampi, F. R., Siregar, Y. U., & Diana, N. A. (2025). Penguatan Tata Kelola Data dan Layanan Digital Melalui Pembentukan PPI Desa dan Aplikasi Smart Village: Studi Kasus di Desa Aikmel Utara Lombok Timur. *Cosecant: Community Service and Engagement Seminar*, 5(1), 162-168. <https://doi.org/10.25124/cosecant.v5i1.9391>
- Kennedy, A., Surya, W. H., & Wartoyo, F. X. (2024). Tantangan dan Solusi Penerapan E-Government di Indonesia. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 4(2), 134–147. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v4i2.4459>
- Khomsah, S., Athiyah, U., Wicaksono, A. D. P., & Nugraha, N. A. S. (2023). Pelatihan dan Pendampingan Penggunaan CMS Aplikasi Desa Online Bagi Desa-Desa di Kabupaten Kebumen. *Indonesian Journal of Community Service and Innovation*, 3(2), 74-82. <https://doi.org/10.20895/ijcosin.v3i2.1196>
- Kusuma, A. R. & Risal, M. (2020). Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pelatihan Pembuatan Website Desa di Desa Loa Duri Ulu. *Jurnal Pelayanan kepada Masyarakat*, 2(2), 140-149, <http://dx.doi.org/10.30872/plakat.v2i2.4971>
- Mayyora, R., Sholihah, Q., Wanusmawatie, I., & Wanto, A. H. (2025). Transformasi Digital Desa

- dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Berkelanjutan: Pendekatan Literature Review. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 5(2), 100-111. <https://doi.org/10.51577/ijpublicati.on.v5i2.615>
- Mubassir, A., Arifin, M. Z., Ishaq, M., & Saiful, M. (2025). Membangun Kesadaran Masyarakat di Lingkungan Perkampungan Desa Transisi Kota: Pendekatan Participatory Action Research. *NAAFI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 71–79. <https://doi.org/10.62387/naafijurnal.ilmiahmahasiswa.v2i1.117>
- Pitrianti, S., Sampetoding, E. A. M., Purba, A. A., & Pongtaming, Y. S. (2023). Literasi Digital pada Masyarakat Desa. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Dan Sistem Informasi*, 3(1), 43-49. <https://doi.org/10.33005/sitasi.v3i1.655>
- Rahma, R. A., Putri, C. C. J., Navasari, O. D., Rachmalia, E. B., & Wulandari, N. A. (2025). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Bringinbendo Kabupaten Sidoarjo. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 3428-3434. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1034>
- Simamora, I. Y., Miko, M., Resty, R., Anur, A., Tazwa, T., Siska, S., Nadia, N., & Manda, M. (2025). Penerapan Konsep Komunikasi Partisipatif pada Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik dan Kebijakan Negara*, 2(3), 180–191. <https://doi.org/10.62383/komunikasi.v2i3.498>
- Subagja, R., & Raturahmi, L. (2025). Pelatihan Jurnalistik dan Literasi Media Bagi Komunitas Crew Jurnalistik Man 1 Garut. *Jurnal Pengabdian Pendidikan Masyarakat*, 6(2), 206-215. <https://doi.org/10.52060/jppm.v6i2.2879>
- Wahyiah, I. R. (2025). Transformasi Digital Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa: Upaya Menuju Smart Village di Desa Bojong Pandan Kecamatan Tunjung Teja. *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, 8(2), 832–849. <https://doi.org/10.61332/ijpa.v8i2.382>
- Wardani, K. R. N., Fitriani, E., Mukti, A. R., Makmuri, M. K., Ulfa, M., Sopiah, N., Amalia, R., & Is, N. P. (2024). Pelatihan Penggunaan Teknologi Digital guna Meningkatkan Penguasaan Materi Pembelajaran dan Literasi Digital pada Guru SMK. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Inovasi Indonesia*, 2(6), 693-700, <https://doi.org/10.54082/jpmii.634>
- Yulisasih, B. N., Surya, R. A., Widiandana, P., Aulia, M.I., & Hartina, S. (2025). Pemberdayaan Pemuda Sebagai Pendamping Teknologi dalam Digitalisasi Layanan Posyandu. *Jurnal Pengabdian Abhinaya*, 1(2), 83-89.